

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum terjadinya revolusi 1979 hubungan Iran dan Suriah belum terlihat dikarenakan Iran menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat. Awal mula kedekatan kedua negara tersebut ketika Suriah membantu Iran pada saat terjadinya perang Iran-Irak tahun 1980-1988. Hal tersebut akhirnya membuat Iran membantu dan mendukung Bashar al-Assad sebagai bentuk kebijakan politik luar negerinya. Setelah jatuhnya rezim Shah Pahlevi pada tahun 1979, Suriah dan Libya dinyatakan sebagai negara yang sangat mendukung Iran. Hal tersebut membuat Suriah dan Libya memberikan dukungannya kepada Iran dengan cara memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk peralatan militer dan sebaliknya Iran juga mengirimkan minyak ke Suriah dan Libya dengan harga yang murah. Sehingga hubungan Iran dan Suriah dapat terjalin dengan baik. Khomeini sebagai pemimpin sekaligus sebagai tokoh revolusi Iran mendapat dukungan penuh dari Hafes al-Assad pada saat itu. Imam Khomeini dikenal sebagai pemimpin Iran yang dapat menjadikan kebijakan politik luar negeri Iran mulai terstruktur dengan menerapkan konsep *Wilayatul Faqih* (Mustahyun, Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah pada Arab Spring Suriah tahun 2011-2016, 2017).

Pada tahun 2011 negara-negara Arab mengalami kegoncangan politik dimana munculnya gerakan-gerakan massa untuk melawan rezim diktator. *Arab Spring* sebagai harapan untuk mencapai sistem yang bersifat demokratis. Penyebab terjadinya *Arab Spring* yaitu adanya sistem pemerintahan yang otoriter di negara-negara Timur Tengah. Hal tersebut menimbulkan gerakan-gerakan masyarakat dalam

bentuk unjuk rasa atau protes untuk menjatuhkan pemimpin yang otoriter. Akibat pemerintahan yang otoriter menimbulkan kesengsaraan terutama untuk masyarakat seperti korupsi, penindasan, dan kemunduran dalam aspek perekonomian. Pemimpin yang otoriter seperti Mesir, Suriah, dan Tunisia mereka mendapatkan kekuasaannya cukup lama dan dalam proses pemilihannya tidak secara demokratis. Selain itu, ketiga negara tersebut menggunakan sistem satu partai dalam membangun rezim politik. Seperti contohnya Bashar al-Assad mampu memegang kekuasaan dengan waktu yang cukup lama dengan dominasi partai Ba'ath (Sahide, *The Arab Spring: membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*, 2015).

Konflik Suriah merupakan salah satu fenomena dari terjadinya Arab Spring di kawasan Timur Tengah. Dimana rakyat melakukan aksi demonstrasi untuk menginginkan perubahan sistem yang lebih demokratis seperti yang terjadi pada Mesir dan Tunisia. Awal mula konflik Suriah muncul akibat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad yang bersifat otoriter. Sebelumnya, pemerintahan Hafedz al-Assad dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter selama 30 tahun. Sistem pemerintahan yang otoriter di Suriah membuat pemerintahan mampu melakukan tindakan yang sewena-wena terhadap rakyat. Pada masa pemeritahan Bashar al-Assad terjadi permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Masalah-masalah tersebut berupa tingkat pengangguran yang tinggi, dan terbatasnya kebebasan politik. Hal tersebut membuat penduduk Suriah melakukan tuntutan untuk mundurnya Presiden Bashar al-Assad. Protes dan demonstrasi yang dilakukan penduduk Suriah di kota Damaskus mendapatkan kekerasan dari aparat keamanan seperti menyemprotkan gas air mata sehingga mampu menelan banyak korban dan rusaknya bangunan-bangunan di Suriah (Fahham A. M., 2014).

Konflik Suriah merupakan suatu konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad dan rakyat. Protes dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat meluas dengan cepat di

wilayah Suriah sehingga menimbulkan perang sipil. Perang tersebut tidak hanya menggunakan senjata sebagaimana digunakan dalam perang, melainkan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia. Seiring dengan meningkatnya demonstrasi di Suriah, Bashar Al-Assad memerintahkan pasukan militer Suriah untuk melawan para pengunjuk rasa. Sehingga kekerasan yang dilakukan pasukan militer Suriah terus meningkat dan bertambahnya korban jiwa. Hal ini mendapat kritik dari para pemimpin negara dan organisasi pembela HAM meminta kekerasan yang dilakukan pemerintah Suriah dapat dihentikan.

Iran yang berada pada posisi pro terhadap rezim Bashar al-Assad mengambil keputusan yaitu mengirim penasihat-penasihat militer *Islamic Guards Corps* (IRGC). Kedatangan penasihat-penasihat tersebut untuk memperkuat militer Suriah dengan cara memberikan pelatihan dan membantu Suriah untuk melawan para pemberontak. Bentuk dukungan Iran lainnya seperti membangun pangkalan militer di Latakia untuk mempermudah dalam pengiriman senjata dari Iran ke Suriah. Dalam menghadapi pergolakan di Timur Tengah Iran dan Suriah menjalani kerjasama yang menguntungkan bagi masing-masing negara. Sehingga membuat Iran memberikan bantuan dengan kekuatan yang dimilikinya untuk mempertahankan rezim Bashar al-Assad. (maulana, 2018).

Pada saat terjadinya pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah, Iran memberikan dukungan kepada gerakan rakyat untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang otoriter. Dukungan Iran terhadap gerakan rakyat tersebut terlihat ketika pergolakan politik terjadi pada Mesir, Yaman, Libya, Bahrain, dan Tunisia. Namun sikap Iran berbeda pada saat pergolakan politik terjadi di Suriah. Iran justru mendukung dan mempertahankan rezim Bashar al-Assad.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang penulis ambil yaitu Mengapa Iran mendukung rezim Bashar al-Assad dalam konflik di Suriah?

C. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas suatu permasalahan memerlukan kerangka dasar teoritik untuk melakukan suatu penelitian. Kerangka dasar teoritik sebagai jembatan yang dapat menghubungkan antara pokok permasalahan dengan hipotesa sehingga pokok permasalahan dapat terjawab dengan jawaban yang memadai. Teori merupakan pengabungan serangkaian konsep yang dapat menghasilkan suatu penjelasan. Teori berfungsi dalam menjelaskan mengapa itu dapat terjadi, dan meramalkan suatu kejadian tersebut di masa depan (Mas'oed, 1994). Untuk menganalisa Iran mendukung rezim Bashar al-Assad dalam konflik di Suriah, penulis menggunakan kerangka pemikiran yaitu

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan tindakan dan keputusan suatu negara terhadap negara lain. Sejumlah keputusan dalam kebijakan politik luar negeri dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan kepentingan nasionalnya. Dalam menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan politik luar negeri, kita dapat menggunakan suatu teori untuk memberikan kemudahan dalam memahami suatu permasalahan yang akan dibahas. Dalam penulisan ini menggunakan politik luar negeri menurut K. J. Holsti

Menurut K. J. Holsti, politik luar negeri atau *Foreign Policy* adalah

“Foreign policy also incorporates ideas that are planned by policy makers in order to solve a problem or uphold some changes in the environment, which can be in the forms of policies, attitudes, or actions of another states or states”.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa politik luar negeri merupakan strategi atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai respon terhadap usaha perlindungan serta pencapaian kepentingan nasionalnya dan refleksi arah kebijakan dan perilaku politik suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Respon yang dilakukan oleh negara tersebut dapat berupa sikap diplomatik tertentu, doktrin/ideologi, militer, strategi non block, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan nasional yang berorientasi ke luar negeri (Safitri, 2011). Menurut K. J. Holsti, politik luar negeri terdapat empat komponen utama dalam suatu kebijakan luar negeri dari yang bersifat umum sampai yang khusus seperti orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan-tujuan, dan tindakan-tindakan (Holsti K. J., 1983).

Tujuan politik luar negeri menurut Holsti terbagi menjadi tiga yaitu tujuan jangka pendek (*short-term*), tujuan jangka menengah (*middle-term*), dan tujuan jangka panjang (*long-term*) (Holsti K. , 1983). Pertama, tujuan jangka pendek atau kepentingan dan nilai inti merupakan kepentingan yang pencapaiannya dibutuhkan pengorbanan sebesar-besarnya. Kepentingan ini termasuk pada tujuan jangka pendek, karena tujuan lain tidak dapat dicapai apabila kepentingan tersebut belum terlaksana. Kedua, tujuan jangka menengah merupakan upaya negara dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan ekonomi melalui tindakan internasional dapat berupa perluasan wilayah dan meningkatkan prestise negara. Ketiga, tujuan jangka panjang merupakan rencana atau impian suatu negara dalam membangun sistem internasional. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, maka suatu negara melakukan tekanan terhadap negara lain untuk mencapai tujuan jangka panjang (Asep Setiawan dan Endang Sulastri, 2017).

Istilah Ideologi berasal dari kata “idea” atau berasal dari kata kerja Yunani “oida” yang artinya gagasan, pengertian, pemikiran, dan keyakinan. Sedangkan kata “logi” berasal dari bahasa Yunani “logos” yang artinya pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa Ideologi merupakan ilmu pengetahuan

tentang gagasan, ide-ide, *science of ideas* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar (Setyowati, 2020). Ideologi menurut Ali Syariati yaitu keyakinan atau gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu ras, dan suatu bangsa (Syariati, 1984). Ideologi suatu negara memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan nasional. Dimana dalam pembentukan Ideologi itu sendiri memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, melestarikan nilai keagamaan, menjaga sistem politik dan hukum, serta menerapkan konsep keadilan.

Kebangkitan syiah mulai terlihat pada saat terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979. Kemenangan revolusi Iran berpengaruh pada kuatnya mazhab syiah di kalangan masyarakat Iran. Imam Khomeini merupakan seorang pemuka agama yang merumuskan ideologi Wilayatul Faqih sebagai sistem politik Iran. Dimana sebelumnya nilai-nilai agama Islam sebagai dasar bagi kehidupan masyarakat menjadi hilang akibat pengaruh budaya barat pada masa pemerintahan Shah Pahlevi. Iran merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dan menganut mazhab Syiah merasa perlu dalam menjaga keutuhan ideologinya dengan melakukan kerjasama dengan Suriah yang memiliki ideologi Syiah. Penduduk Suriah mayoritas menganut madzhab Sunni dan kaum Syiah hanya minoritas tetapi pemerintahan Suriah dipegang oleh kaum Syiah. Sehingga Iran memberikan dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad pada konflik di Suriah karena Iran memiliki kesamaan dalam ideologi terhadap pemerintahan Suriah, Iran menjaga ideologi Syiah di Suriah dari pengaruh ideologi bangsa lain, dan Suriah menjadi gerbang bagi Iran dalam menyebarkan ideologi Syiah di kawasan Timur Tengah. Apabila rezim Bashar al-Assad diturunkan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang berasal dari kaum Sunni maka Iran merasa kesulitan dalam mengekspor ideologi Syiah dan sistem politiknya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut termasuk dalam tujuan politik luar negeri jangka panjang (*long-term*).

2. Konsep Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *geo* yang berarti bumi atau wilayah hidup. Sedangkan *politeia* berasal dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat dan *teia* yang berarti urusan (politik) kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006). Secara luas geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik suatu negara yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan dan strategi nasional yang dilaksanakan berdasarkan dorongan aspirasi nasional geografi suatu negara, dimana dalam pelaksanaan tersebut menghasilkan keberhasilan akan berdampak pada sistem politik suatu negara. Geopolitik juga dapat dijadikan sebagai analisa kebijakan luar negeri yang menggunakan variable geografi untuk memahami perilaku politik internasional. Hal ini menjadikan geopolitik sebagai hubungan antara politik dan teritori suatu negara dalam skala lokal bahkan internasional. Dalam penulisan ini menggunakan konsep geopolitik menurut Saul Bernard Cohen.

Menurut Saul Bernard Cohen dalam bukunya yang berjudul "*Geopolitics of the World System*", geopolitik adalah "*Geopolitics is the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and prespectives, and on he other hand, political processes. Both geographical settings and political processes are dynamic, and each influences and is influenced by the other. Geopolitics addresses the consequences of this interaction*" (Gokmen, 2010).

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa geopolitik adalah analisis interaksi antara pengaturan dan prespektif geografis dengan menggunakan proses politik. Keduanya, baik pengaturan geografis ataupun proses politik bersifat dinamis. Dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh yang lain. Sehingga geopolitik membahas konsekuensi dari interaksi ini. Menurut Saul Bernard Cohen, dalam konsep geopolitik terdapat lima level yang terdiri dari *geostrategic realm, geopolitical*

region, national states, orders of national power, dan gateway states and regions. Dalam penulisan ini menggunakan *national states, order of national power, dan gateway states and regions.* Pada level *national state* yang menjelaskan bahwa sebuah negara dapat dinyatakan kuat ketika negara tersebut unggul dalam bidang ekonomi, budaya, sumber daya alam, dan militer. Pada level *order of national power* terdiri dari beberapa bagian yaitu *major powers, regional powers, dan meso powers.* Saul Bernard Cohen menjelaskan bahwa *regional powers* merupakan kompetisi antar negara yang tidak terlepas dari kekuatan ekonomi dan militer dari negara tetangganya dalam skala regional. Sedangkan pada level *gateway states and regions,* Cohen menjelaskan bahwa suatu negara memiliki peran yang sangat penting bagi negara lain sebagai pintu untuk masuk dan keluarnya beberapa aspek seperti ekonomi, militer, ideologi, dan politik (Cohen, 2015).

Keterlibatan Iran dalam konflik di Suriah karena adanya kepentingan geopolitik. Iran dan Arab Saudi merupakan negara yang memiliki pengaruh terbesar di Timur Tengah. Hal tersebut terlihat ketika terjadinya konflik di Suriah dimana Iran memberikan bantuan terhadap pemerintahan Suriah dan Arab Saudi memberikan bantuan pada tentara pemberontak. Kompetisi yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi untuk mendapatkan pengaruh besar dalam konflik di Suriah tidak terlepas dari kekuatan ekonomi dan militer dari masing-masing negara serta kompetisi tersebut terjadi dalam tingkat regional. Hal ini termasuk dalam konsep geopolitik level *regional power.* Iran merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang dapat meningkatkan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer mampu berpengaruh pada tingkat regional. Selain itu, madzhab Syiah sebagai ideologi Iran yang kekuatannya dinilai mampu mempengaruhi eksistensi Islam di Timur Tengah. Hal ini termasuk dalam konsep geopolitik level *national state.* Iran menganggap bahwa Suriah merupakan negara yang strategis untuk mengimbangi dominasi Arab Saudi di Timur Tengah. Upaya Iran untuk menjadi negara dengan dominasi terbesar di Timur Tengah dengan cara memberikan bantuan kepada

pemerintahan Suriah dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Rezim Bashar al-Assad dan Iran menjadikan Suriah sebagai negara yang berperan penting dalam penyebaran ideologi serta sistem politik. Hal ini termasuk dalam konsep geopolitik level *gateway states and regions*. Seperti yang kita ketahui Iran merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat terutama dalam persenjataannya. Dalam menangani konflik di Suriah, pemerintah Suriah sangat membutuhkan dukungan dan bantuan berupa peralatan militer. Iran sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Suriah menanggapi hal tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan seperti peralatan militer.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran diatas, maka diambil hipotesis bahwa Iran mendukung rezim Bashar al-Assad dalam konflik di Suriah dikarenakan:

1. Kesamaan ideologi yang dianut yaitu mazhab syiah dan Iran berupaya dalam mempertahankan serta menjaga ideologi syiah di Suriah dari pengaruh ideologi bangsa lain.
2. Kepentingan geopolitik berupa Suriah merupakan negara yang sangat strategis bagi Iran dalam menyebarkan ideologi dan meningkatkan kekuatan politik untuk mengimbangi dominasi Arab Saudi di Timur Tengah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan gambaran pada perubahan sikap pemerintahan Iran yang sebelumnya menentang pemerintahan otoriter pada saat terjadi pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah menjadi Iran cenderung mendukung pemerintahan Suriah pada saat pergolakan politik terjadi di Suriah.
2. Mengetahui kepentingan Iran dalam mendukung rezim Bashar al-Assad terkait konflik di Suriah.

F. Metodologi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penulisan mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan Iran mendukung rezim Bashar al-Assad pada konflik Suriah dengan menggunakan website yang terpercaya. Dalam mengelolah data dan mengumpulkan data penulis menggunakan Studi pustaka (*Library Research*). Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana dalam melengkapi data penulis menggunakan buku, jurnal, koran, dan mengunjungi situs di internet. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi jangkauan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan juga sebagai pengingat bagi penulis dalam melakukan penelitian agar tetap disiplin. Penulis membatasi jangkauan penelitiannya dengan berfokus pada negara Iran mengenai kepentingan Iran mendukung rezim Bashar al-Assad dalam konflik di Suriah tahun 2011-2020.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini yang membahas mengenai kepentingan geopolitik Iran dalam konflik di Suriah ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini akan menjelaskan mengenai terbentuknya Negara Republik Islam Iran melalui revolusi serta dinamika politik luar negeri Iran pasca revolusi hingga menjelang Arab Spring dan dilanjutkan dengan politik luar negeri Iran terhadap Suriah.

Bab III, bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan Iran terhadap fenomena Arab Spring, dinamika konflik yang terjadi di Suriah pada masa pemerintahan Bashar al-Assad, kemudian sikap dan peran Iran dalam mendukung pemerintahan Bashar al-Assad dalam konflik tersebut.

Bab IV, bab ini merupakan pembuktian hipotesa yang akan menerangkan sebab-sebab Iran dalam memberikan dukungan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad dalam krisis di Suriah.

Bab V, bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan penelitian. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjelaskan kembali penelitian yang sudah disusun dan mempertegas kembali jawaban penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian.